

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN DAN TELAAH LITERATUR**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sebuah tata kelola yang baik (*Good Governance*) akan terwujud apabila Pemerintah Daerah menerapkan upaya dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Besarnya kewenangan daerah merupakan salah satu amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan tentang penyerahan kewenangan pengolaan keuangan kepada daerah, sehingga timbul tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai organisasi publik untuk meningkatkan akuntabilitas dalam mengelolah keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta taat kepada peraturan perundang-undangan.

Menurut Suwarjeni dalam (Luthfiani et al., 2020) Akuntabilitas atau pertanggung jawaban adalah suatu bentuk keharusan seseorang agar semua tugas dan kewajiban yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan keuangan menjadi suatu cerminan dalam mengetahui apakah suatu kegiatan pemerintahan telah berjalan dengan baik, maka dari itu pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga dari publikasi laporan keuangan tersebut dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi dasar pengambilan keputusan (Erawati & Tarigan, 2019).

Selain itu, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Sumatera Utara untuk tahun 2021 menunjukkan bahwa ada 24 kabupaten / Kota di Sumatera Utara yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dan sejumlah 7 kota dan Kabupaten yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Salah satu Kabupaten yang mendapat opini WDP adalah Kabupaten Nias Selatan. Untuk 7 tahun terakhir, Kabupaten Nias Selatan mendapatkan opini Tidak (menolak) Memberi Pendapat (TMP) 2015-2017 kemudian Wajar Dengan Pengecualian dari tahun 2018– 2022

**Tabel 1.1**  
**Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Nias Selatan**

No	Tahun	Opini BPK
1	2015	Tidak (menolak) Memberi Pendapat (TMP)
2	2016	Tidak (menolak) Memberi Pendapat (TMP)
3	2017	Tidak (menolak) Memberi Pendapat (TMP)
4	2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2019	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
6	2020	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
7	2021	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
8	2022	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

**Sumber:** [sumut.bpk.go.id](http://sumut.bpk.go.id)

Rendahnya kualitas laporan keuangan bisa disebabkan oleh keterampilan (*skill*) yang dimiliki oleh karyawan atau pegawai dapat diukur dengan lama masa kerja atau pengalaman kerja yang dimiliki (Budiono et al., 2018). Orang yang berpengalaman dalam bekerja memiliki kemampuan kerja yang lebih baik dari orang yang baru saja memasuki dunia kerja, karena orang tersebut telah belajar dari kegiatan-kegiatan dan permasalahan yang timbul dalam kerjanya.

Selanjutnya pemahaman akuntansi menurut Nova dalam (Dewa et al., 2021) dapat diartikan sebagai pemahaman seorang pegawai akan siklus atau prosedur akuntansi yang dimulai dari proses akuntansi yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, pembukuan atau pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan. (Yenni, 2017), (Dewa et al., 2021) dan (Lestari & Dewi, 2020) menguji secara empiris pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Atika et al., 2019) yang menguji secara empiris pemahaman akuntansi, pengalaman kerja serta peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan Kota Medan.

Selain faktor pengalaman kerja dan pemahaman akuntansi, peran internal audit juga merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Ketika para audit internal melaksanakan pekerjaannya dengan benar, maka mampu mewujudkan lembaga tersebut dengan kualitas laporan keuangan yang baik dan benar (Nisa & Haryanto, 2021).

Tujuan utama Audit Internal menurut Hiro (2006) dalam (Atika et al., 2019) yaitu meyakinkan keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi, kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur dan ketentuan perundangan, perlindungan terhadap harta organisasi, penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien serta tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Atika et al., 2019) menunjukkan bahwa ada pengaruh seecara simultan terhadap kualitas laporan keuangan tetapi secara parsial tidak memiliki pengaruh. Demikian juga dengan hasil peneltian yang dilakukan oleh (Tomasoa & Meiman, 2022) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel Peran Internal Audit dan Kualitas Laporan Keuangan daerah. Selanjutnya hasil penelitian dari (Nazaruddin & Syahrial, 2017) menunjukkan bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Persepsi dukungan organisasi sebagai variabel pemoderasi yang berarti dapat memperlemah atau memperkuat penelitian, juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena dukungan organisasi adalah segala usaha yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka membantu atau menghambat prestasi kerja. Telah didefinisikan sebagai "sejauh mana karyawan

merasakan bahwa kontribusi mereka dihargai oleh organisasi mereka dan bahwa perusahaan peduli dengan kesejahteraan mereka" (Destra et al., 2022). "Dukungan organisasi yang dirasakan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana karyawan menganggap bahwa organisasi mereka menghargai kontribusi mereka, peduli dengan kesejahteraan mereka, dan memenuhi kebutuhan sosio-emosional mereka" menurut Eisenberger et al., 2002 dalam (Destra et al., 2022).

Hasil penelitian dari (Ayu et al., 2017) Efek moderasi dukungan organisasional terhadap kinerja juga ditemukan signifikan yang artinya dukungan organisasional mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh efikasi diri terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya penelitian dari (Maulana Saud, 2016).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa perlu untuk mengetahui alasan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan yang mendapat "Tidak (menolak) Memberi Pendapat (TMP) 2015-2017" kemudian Wajar Dengan Pengecualian dari tahun 2018– 2021.

### **Identifikasi Masalah**

1. Kualitas laporan keuangan yang sangat rendah memposisikan Kabupaten Nias Selatan mendapatkan opini Tidak (menolak) Memberi Pendapat (TMP) 2015-2017.
2. Kualitas laporan keuangan yang sangat rendah memposisikan Kabupaten Nias Selatan memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian dari tahun 2018– 2021
3. Penempatan pegawai di bagian Keuangan yang kurang memahami Akuntansi
4. Pengalaman kerja pegawai yang minim sehingga belum mampu melakukan pekerjaan dengan baik akibatnya kualitas laporan keuangan sangat rendah.
5. Peran audit internal berkaitan langsung dengan kualitas laporan keuangan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
6. Dukungan organisasi yang seharusnya dilakukan oleh organisasi dalam rangka membantu membantu prestasi kerja malah seringkali menghambat prestasi kerja.
7. Inkonsistensi penelitian terdahulu

### **Perumusan Masalah**

1. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Nias Selatan?
2. Apakah Pemahaman Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Nias Selatan?
3. Apakah Peran Internal Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Nias Selatan?
4. Apakah Dukungan Organisasi dapat memoderasi pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Nias Selatan?
5. Apakah Dukungan Organisasi dapat memoderasi pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Nias Selatan?

6. Apakah Dukungan Organisasi dapat memoderasi pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Nias Selatan?

### **Tujuan Penelitian**

1. Pengaruh Pengalaman Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Nias Selatan?
2. Pengaruh Pemahaman Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Nias Selatan?
3. Pengaruh Peran Internal Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Nias Selatan?
4. Pengaruh Dukungan Organisasi dalam memoderasi pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Nias Selatan?
5. Pengaruh Dukungan Organisasi dalam memoderasi pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Nias Selatan?
6. Pengaruh Dukungan Organisasi dalam memoderasi pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Nias Selatan?

## **1.2. LANDASAN TEORI DAN TELAAH LITERATUR**

### **1.2.1. Landasan Teori**

#### **1.2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan (*Agency theory*) menggambarkan sebuah kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agent untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Hal ini membantu dalam menerapkan berbagai mekanisme tata kelola untuk mengendalikan tindakan pemerintah di perusahaan yang dimiliki bersama (Panda & Leepsa, 2017)

Teori agen berpendapat bahwa terdapat kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agen yang menimbulkan konflik kepentingan. Untuk mengurangi hal tersebut, maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan agen. Laporan keuangan menjadi salah satu alat memonitoring untuk mengurangi adanya *agency cost* (Kasmawati, 2021)

#### **1.2.1.2. Teori Stewardship**

*Theory stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

#### **1.2.1.3. Teori Sinyal (*Signalling*)**

Teori sinyal atau *signalling theory* juga menjelaskan alasan suatu perusahaan mempunyai dorongan dalam memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dalam penelitian ini, teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah menjadi pihak yang ditunjuk oleh masyarakat untuk memberikan sinyal

kepada masyarakat juga dengan cara memberikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

#### **2.1.4. Teori Kegunaan-Keputusan (Decision-Usefulness Theory)**

Pendekatan model keputusan ditujukan untuk mengetahui informasi apa yang diperlukan untuk membuat keputusan. Teori kegunaan-keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna informasi akuntansi.

### **1.3. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1: Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
- H2: Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
- H3: Peran Internal Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
- H4: Dukungan organisasi dapat memoderasi pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Laporan Keuangan Daerah.
- H5: Dukungan organisasi dapat memoderasi pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kinerja Laporan Keuangan Daerah.
- H6: Dukungan organisasi dapat memoderasi pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kinerja Laporan Keuangan Daerah.